



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR // TAHUN 2014

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA,
TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA
DAN TUNJANGAN KETUA RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa, Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA, TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN KETUA RUKUN TETANGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Pemerintah Desa adalah Sangadi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri Sekretaris Desa, Porobis-porobis dan Kepala-kepala Dusun;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Badan Permusyawaratan desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Rukun Tetangga (RT) adalah bagian dari wilayah dusun yang ada di dalam desa;

f

8. Bantuan keuangan bagi desa adalah keseluruhan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada desa yang terdiri dari ADD, TPAPD dan Tunjangan Ketua RT;
9. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diberikan ke desa berdasarkan rumus penghitungan sesuai ketentuan yang berlaku untuk dikelola oleh Pemerintah Desa secara otonom berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah himpunan pendapatan yang diperoleh oleh Desa dan pembelanjaan yang dilakukan oleh desa selama satu tahun berjalan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.
11. Institusi Pengelola Alokasi Dana Desa adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi di tingkat Kabupaten/Kota, Pendampingan di tingkat Kecamatan, dan Pelaksanaan di tingkat Desa.

BAB II JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BAGI DESA

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2014, Jumlah keseluruhan bantuan keuangan bagi desa se Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah sebesar Rp. 15.363.800.000,- (lima belas milyar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian peruntukan sebagai berikut:

- a. Alokasi Dana Desa adalah sebesar Rp. 7.616.600.000,- (tujuh milyar enam ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa sebesar RP. 6.163.200.000,-(enam milyar seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- c. Tunjangan Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp. 1.584.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah).

Pasal 3

(1) Bahwa Peruntukan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 7.616.600.000,- (tujuh milyar enam ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) adalah sebagai berikut :

- a. Alokasi Dana bagi 69 desa definitif yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar Rp. 6.956.600.000,- (enam milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Alokasi Dana bagi 12 desa persiapan sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah), dengan jumlah alokasi dana bagi setiap desa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

(2) Bahwa Peruntukan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa sebesar RP. 6.163.200.000,-(enam milyar seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah); bagi Sangadi dan Perangkat Desa non PNS adalah sebagai berikut :



- a. Sangadi sebesar Rp. 1.750.000,- perbulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan;
 - c. Porobis sebesar Rp. 650.000,- perbulan;
 - d. Kepala Dusun sebesar Rp. 650.000,- perbulan;
- (3) Bahwa Peruntukan Tunjangan Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp. 1.584.000.000.- (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah). adalah masing-masing Ketua Rukun Tetangga non PNS sebesar Rp. 250.000,-.

Pasal 4

- (1) Mekanisme penghitungan ADD bagi 69 desa definitif sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :
 - a. 60 % dari Rp. 6.956.600.000,- = Rp. 4.173.960.000,-
 - b. 40 % dari Rp. 6.956.600.000,- = Rp. 2.782.640.000,-
- (2) Pembagian ADD bagi desa sebesar Rp. 2.782.640.000,- secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan berdasarkan rumus dengan menggunakan Variabel Independen Utama dan Variabel Independen Tambahan sebagai berikut :
 - a. Variabel Independen Utama, terdiri dari :
 1. Tingkat Kemiskinan,
 2. Pendidikan Dasar,
 3. Tingkat Kesehatan,
 4. Keterjangkauan Desa,
 - b. Variabel Independen Tambahan, terdiri dari ;
 1. Stabilitas Desa,
 2. Jumlah Penduduk,
 3. Luas Wilayah,
- (3) Nilai Bobot bagi masing-masing Variabel Independen Utama dan Variabel Independen Tambahan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan sebagai berikut :

Variabel	Bobot	Angka Bobot (a)=Bobot/Jml Bobot
1. Tingkat Kemiskinan	3	0.17
2. Keterjangkauan Desa	3	0.17
3. Tingkat Kesehatan	2	0.11
4. Pendidikan Dasar	2	0.11
5. Jumlah Penduduk	2	0.11
6. Stabilitas Desa	4	0.22
7. Luas Wilayah	2	0.11
J u m l a h	18	

- (4) Variable tingkat stabilitas desa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3) pada variabel 6 dalam Peraturan Bupati ini, di dasarkan atas tingkat permasalahan yang timbul di desa dan tindak lanjut penanganannya, dengan kriteria sebagai berikut :

f

- a. Desa dikategorikan *Sangat Stabil* dan diberikan nilai 3, apabila permasalahan yang timbul di desa dapat diselesaikan oleh pemerintah dan masyarakat desa atau tidak ada masalah di desa yang diselesaikan oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten,
- b. Desa dikategorikan *Cukup Stabil* dan diberikan nilai 2, apabila permasalahan yang timbul di desa tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah dan masyarakat desa tapi harus diselesaikan oleh pemerintah kecamatan,
- c. Desa dikategorikan *Tidak Stabil* dan diberikan nilai 1, apabila permasalahan yang timbul di desa tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah kecamatan tapi harus diselesaikan oleh pemerintah kabupaten.

BAB III

PRINSIP – PRINSIP PENGELOLAAN ADD

Pasal 5

- (1) Pengelolaan ADD bagi desa, Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa dan Tunjangan Penghasilan Ketua RT merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Keseluruhan jumlah bantuan keuangan desa yang diterima oleh desa pada Tahun 2014, harus termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2014;
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.

Pasal 6

- (1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
- (2) Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB IV

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

Penggunaan Alokasi Dana Desa di musyawarahkan oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun yang bersangkutan.



Pasal 8

Penggunaan dan peruntukan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. 30 % untuk kegiatan operasional pemerintah desa;
- b. 70 % untuk kegiatan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 9

(1) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan operasional pemerintah desa sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf (a) dalam Peraturan Bupati ini, meliputi kegiatan rutin pemerintahan desa sebagai berikut :

a. Honorarium PJAK, PJOK dan Bendahara Desa, dengan besaran sebagai berikut :

1. Honorarium PJAK Desa : Rp. 250.000,00/bulan
2. Honorarium PJOK Desa : Rp. 200.000,00/bulan
3. Honorarium Bendahara Desa : Rp. 150.000,00/bulan

b. Kebutuhan Alat tulis Menulis Kantor ;

c. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah dengan ketentuan :

1. Perjalanan Dinas Dari Desa Ke Kecamatan maksimal 1 (satu) hari :
Transport pulang pergi : Rp. 50.000,-
Lumpsum : Rp. 50.000,-

2. Perjalanan Dinas Dari Desa Ke Kabupaten maksimal 1 (satu) hari :

- Kecamatan Bolaang Uki Transport pulang pergi : Rp. 50.000,-
Lumpsum : Rp. 50.000,-
- Kecamatan Posigadan Transport pulang pergi : Rp. 150.000,-
Lumpsum : Rp. 50.000,-
- Kecamatan Pinolosian Transport pulang pergi : Rp. 125.000,-
Lumpsum : Rp. 50.000,-
- Kecamatan Pinolosian Tengah Transport pulang Pergi : Rp. 125.000,-
Lumpsum : Rp. 50.000,-
- Kecamatan Pinolosian Timur Transport pulang pergi : Rp. 150.000,-
Lumpsum : Rp. 50.000,-

3. Perjalanan Dinas Dari Desa Ke Luar Daerah Kabupaten (dalam propinsi) maksimal 3 (tiga) hari :

- Transport pulang pergi : Rp. 300.000,-
- Akomodasi dan Penginapan : Rp. 250.000,-/hari
- Uang Makan : Rp. 200.000,-/hari
- Uang Saku : Rp. 250.000,-/hari

4. Perjalanan dinas keluar propinsi disesuaikan dengan standar biaya perjalanan dinas setara golongan III.

d. Biaya Konsumsi Rapat ;

f

Pasal 8

Penggunaan dan peruntukan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. 30 % untuk kegiatan operasional pemerintah desa;
- b. 70 % untuk kegiatan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 9

(1) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan operasional pemerintah desa sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf (a) dalam Peraturan Bupati ini, meliputi kegiatan rutin pemerintahan desa sebagai berikut :

a. Honorarium PJAK, PJOK dan Bendahara Desa, dengan besaran sebagai berikut :

1. Honorarium PJAK Desa : Rp. 250.000,00/bulan
2. Honorarium PJOK Desa : Rp. 200.000,00/bulan
3. Honorarium Bendahara Desa : Rp. 150.000,00/bulan

b. Kebutuhan Alat tulis Menulis Kantor ;

c. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah dengan ketentuan :

1. Perjalanan Dinas Dari Desa Ke Kecamatan maksimal 1 (satu) hari :
Transport pulang pergi : Rp. 50.000,-
Lumpsum : Rp. 50.000,-

2. Perjalanan Dinas Dari Desa Ke Kabupaten maksimal 1 (satu) hari :

- Kecamatan Bolaang Uki Transport pulang pergi : Rp. 50.000,-
Lumpsum : Rp. 50.000,-
- Kecamatan Posigadan Transport pulang pergi : Rp. 150.000,-
Lumpsum : Rp. 50.000,-
- Kecamatan Pinolosian Transport pulang pergi : Rp. 125.000,-
Lumpsum : Rp. 50.000,-
- Kecamatan Pinolosian Tengah Transport pulang Pergi : Rp. 125.000,-
Lumpsum : Rp. 50.000,-
- Kecamatan Pinolosian Timur Transport pulang pergi : Rp. 150.000,-
Lumpsum : Rp. 50.000,-

3. Perjalanan Dinas Dari Desa Ke Luar Daerah Kabupaten (dalam propinsi) maksimal 3 (tiga) hari :

- Transport pulang pergi : Rp. 300.000,-
- Akomodasi dan Penginapan : Rp. 250.000,-/hari
- Uang Makan : Rp. 200.000,-/hari
- Uang Saku : Rp. 250.000,-/hari

4. Perjalanan dinas keluar propinsi disesuaikan dengan standar biaya perjalanan dinas setara golongan III.

d. Biaya Konsumsi Rapat ;

f

- e. Biaya pemilihan sangadi bagi desa yang akan melaksanakan pilsang ;
- f. Pakaian Dinas Sangadi dan Perangkat Desa ;
- g. Biaya perbaikan dan perawatan kendaraan dinas sangadi ;
- h. Dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan operasional pemerintahan desa.

(2) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf b dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. 30 % untuk kegiatan fisik di desa, meliputi ;
 - 1. Pembuatan gorong-gorong ;
 - 2. Pembangunan balai desa ;
 - 3. Rehabilitasi balai desa/ rehabilitasi kantor desa ;
 - 4. Pembuatan jalan setapak/ jalan desa ;
 - 5. Pembuatan Drainase/ Saluran Air ;
 - 6. Pengadaan Katinting desa ; dan
 - 7. Pengadaan Tanah Kas Desa/ Tanah Bengkok, dan lain sebagainya.
- b. 20 % untuk kegiatan Badan Permusyawaratan Desa/ BPD, seperti ;
 - 1. Insentif atau penunjang kinerja BPD ;
 - 2. Kebutuhan Alat Tulis Menulis untuk kegiatan BPD ;
 - 3. Perjalanan Dinas BPD ;
 - 4. Biaya Konsumsi Rapat BPD ;
- c. 10 % untuk penunjang kegiatan Pemberdayaan PKK, seperti :
 - 1. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan PKK ;
 - 2. Pengadaan konsumsi rapat – rapat PKK ;
 - 3. Pengadaaan Pakaian PKK ;
 - 4. Biaya sosialisasi PKK ditingkat dusun ; dan
 - 5. Kegiatan lomba PKK dan kegiatan – kegiatan PKK lainnya.
- d. 10 % untuk operasional pemuka agama yang ada di desa yang terdiri dari imam dan pegawai syar'i, pendeta, penatua dan Gembala, seperti;
 - 1. Insentif bagi imam dan pegawai syar'i. Pendeta, Penatua dan Gembala;
 - 2. Pengadaan Pakaian dan perlengkapan lainnya bagi pemuka agama.
- e. 10 % untuk operasional lembaga adat yang ada di desa, seperti ;
 - 1. Insentif bagi ketua dan anggota lembaga adat ;
 - 2. Pengadaan pakaian adat ; dan
 - 3. Biaya konsumsi rapat lembaga adat.
- f. 10 % untuk kegiatan pemberdayaan pemuda dan olahraga, seperti :
 - 1. Biaya kegiatan perkemahan pemuda diluar desa ;
 - 2. Pengadaan alat – alat olahraga ;
 - 3. Kegiatan lomba dan pertandingan olahraga yang melibatkan pemuda;
 - 4. Biaya konsumsi rapat pemuda ; dan
 - 5. Perjalanan dinas forum pemuda di desa dan kegiatan pemuda lainnya.
- g. 5 % untuk operasional lembaga pemberdayaan masyarakat desa, seperti;
 - 1. Insentif bagi lembaga pemberdayaan masyarakat desa ;
 - 2. Pengadaan pakaian lembaga pemberdayaan masyarakat desa ; dan
 - 3. Biaya konsumsi rapat.
- h. 5 % untuk operasional petugas Hansip (Linmas) yang ada di desa ;
 - 1. Insentif bagi petugas Hansip (Linmas) ; dan

2. Pengadaan pakaian hansip.
- (3) Bahwa penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan operasional pemerintahan, kegiatan fisik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas prinsip prioritas kegiatan sesuai dengan kemampuan dana yang ada.
 - (4) Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya yang dibuktikan dengan kwitansi pengeluaran keuangan dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban lainnya.
 - (5) Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (a) harus dapat dipertanggungjawabkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.
 - (6) Rincian penggunaan, peruntukan dan pembagian Alokasi Dana Desa, TPAPD dan Tunjangan Ketua RT baik desa definitiv maupun desa persiapan adalah sebagaimana tercantum dalam *Lampiran I* dan *Lampiran II* Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Bahwa hal-hal yang belum jelas menyangkut teknis penggunaan ADD pada kegiatan operasional pemerintahan dan kegiatan fisik serta kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, akan diatur lebih lanjut oleh Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA (TPAPD) DAN TUNJANGAN RUKUN TETANGGA (RT)

Pasal 11

- (1). Pembayaran Alokasi Dana Desa dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap sesuai dengan jumlah dana yang ditetapkan bagi tiap desa :
 - a. Tahap I sebesar : 60 % (enampuluh persen);
 - b. Tahap II sebesar : 40 % (empatpuluh persen);
- (2). Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa dan Tunjangan RT dilaksanakan setiap bulan;
- (3). Dalam rangka kelancaran, keamanan dan ketepatan pembayaran ADD, TPAPD dan Tunjangan Penghasilan Ketua RT ke setiap desa, maka penyaluran ADD, TPAPD dan Tunjangan Penghasilan Ketua RT dilaksanakan oleh Bank;
- (4). Sangadi, perangkat desa dan ketua-ketua RT diwajibkan membuka rekening di Bank;
- (5). Setiap tahapan pencairan dana baik ADD, TPAPD, Tunjangan RT harus dilampiri rekomendasi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;



- (6). Pemerintah Desa mengajukan permintaan ADD dilampiri dengan Peraturan Desa tentang APBDes tahun 2014 ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pasal 12

Setiap pergantian Perangkat Desa dan Ketua RT, harus segera disampaikan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Camat dengan Surat Keputusan.

BAB VI

INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA

Pasal 13

- (1) Di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten dengan Surat Keputusan Bupati dengan susunan tim adalah sebagai berikut :

Pengarah	: 1. Bupati Bolaang Mongondow Selatan 2. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan
Penanggung jawab	: Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Ketua	: Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Sekretaris	: Kepala Bidang Penguatan Aparatur dan Pengembangan Desa BPMPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
Anggota	: 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra 2. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; 3. Unsur Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; 4. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; 5. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; 6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; 7. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna BPM-PD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; 8. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat BPM-PD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; 9. Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Masyarakat BPM-PD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

f

10. Kasubbid Penguatan Aparatur dan Administrasi Pemerintahan Desa BPM-PD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
11. Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPM-PD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
12. Unsur LSM;
13. Unsur Media Cetak.

- (2) Tugas Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) di atas, adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - b. Membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa;
 - c. Menentukan besaran ADD yang diterima oleh setiap desa yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan rumus yang telah ditetapkan;
 - d. Melaksanakan bimbingan dan fasilitasi teknis pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa;
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa;
 - f. Melaporkan kegiatan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Di tingkat Kecamatan di bentuk Tim Pendamping Alokasi Dana Desa yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati dengan susunan tim yaitu ;
- | | | |
|--|---|----------------------|
| Ketua | : | Camat |
| Penanggung jawab Administrasi Kegiatan | : | Sekretaris Kecamatan |
| Penanggung jawab Operasional Kegiatan | : | Kepala Seksi PMD |
- (2) Tugas Tim Pendamping Alokasi Dana Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) di atas adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan bimbingan dan fasilitasi teknis Pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa di wilayah kecamatannya masing-masing,
 - b. Melaksanakan bimbingan dan fasilitasi penyusunan Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di wilayah kecamatannya masing-masing,
 - c. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah kecamatannya masing-masing,
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ADD secara berkelanjutan,
 - e. Menyusun laporan penggunaan ADD di wilayah kecamatannya masing-masing dan disampaikan kepada Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Di tingkat desa dibentuk Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Tingkat Desa berdasarkan Surat Keputusan Camat dengan susunan Tim sebagai berikut:

f

Penanggung jawab Administrasi Kegiatan : Sekretaris Desa
Penanggung jawab Operasional Kegiatan : Porobis Pembangunan
Bendahara : Bendahara Desa

(2) Tugas Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) di atas, adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pendataan dan memasukan laporan data indikator dan variabel yang digunakan dalam penghitungan bantuan keuangan bagi desa kepada Tim Fasiltasi ADD Tingkat Kabupaten melalui Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan,
- b. Menerima, menyimpan dan membayarkan Alokasi Dana Desa kepada pihak-pihak pengguna ADD berdasarkan permintaan yang ada,
- c. Meminta Surat Pertanggungjawaban penggunaan ADD dari pihak pengguna.
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD dan menyampaikannya kepada Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten melalui Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan.
- e. Menyampaikan laporan penggunaan ADD setiap bulan.
- f. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penggunaan ADD di desanya masing-masing.

BAB VII

SISTEM PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pelaporan pengelolaan dan penggunaan ADD, disampaikan setiap akhir bulan berjalan sejak dana diterima oleh Desa dan dilaksanakan secara berjenjang melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa diketahui oleh Sangadi ke Tim Pendamping tingkat Kecamatan, selanjutnya Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Pasal 17

Subtansi laporan sebagaimana dimaksud pasal 16 adalah meliputi :

- a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana,
- b. Masalah yang dihadapi,
- c. Hasil akhir penggunaan dana

f

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan ADD dilaksanakan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jika terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa kemudian kecamatan.
- (3) Indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD adalah sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan
 1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD;
 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
 3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh pemerintah desa.
 - b. Penggunaan
 1. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APB Desa;
 2. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan;
 3. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
 4. Besarnya jumlah penerima manfaat ;
 5. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan ADD;
 6. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa;
 7. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut.

Pasal 19

Seluruh Penerimaan dan Pengeluaran ADD harus dibuktikan dengan kwitansi yang ditandatangani oleh bendahara desa dengan mengetahui PJAK dan PJOK tingkat desa.

Pasal 20

- (1) Administrasi pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi sangadi, perangkat desa, tim pelaksana ADD tingkat desa, BPD dan PKK harus dibuktikan dengan surat perintah tugas, surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dan kwitansi/bukti penerimaan biaya perjalanan dinas dan laporan pelaksanaan tugas.
- (2) Administrasi pertanggungjawaban pengadaan ATK dan barang-barang lainnya untuk kegiatan fisik harus melampirkan berupa nota pesanan bahan/barang, berita acara penerimaan barang dan kwitansi pembayaran.
- (3) Administrasi pertanggungjawaban pengadaan rehabilitasi gedung atau pengadaan gedung kantor yang bersifat konstruksi/fisik harus

dilampirkan berupa laporan pelaksana pekerjaan, gambar pekerjaan, gambar pekerjaan 0%, 50% dan 100%, Nota Pesanan Bahan/Barang, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Penerimaan Pekerjaan dan Kwitansi Pembayaran.

BAB VIII

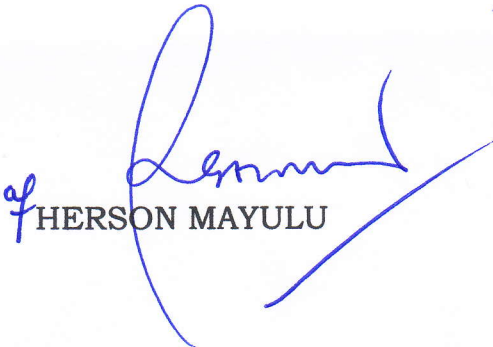
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

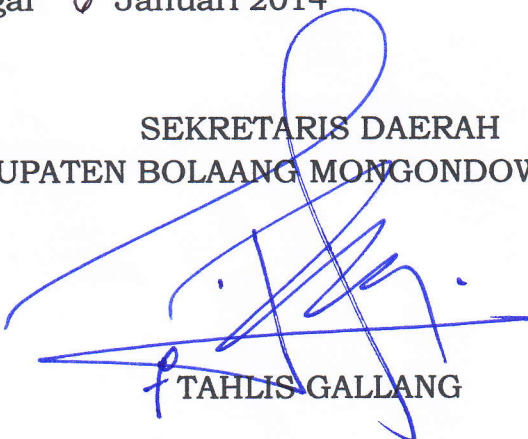
Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2014

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


TAHLIS GALLANG

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR // TAHUN 2014
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA,
 TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA DAN
 TUNJANGAN KETUA RUKUN TETANGGA

**DAFTAR REKAPITULASI KEUANGAN BAGI DESA TAHUN 2014
 UNTUK MASING-MASING DESA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	KECAMATAN/DESA	ADD										JUMLAH ADD	JUMLAH TPAPD	JUMLAH TUNJANGAN RT	JUMLAH TOTAL BANTUAN KEUANGAN DESA
		OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA 30% (Rp)	FISIK DAN PEMBERDAYAAN 70% (Rp)	RINCIAN PENGGUNAAN FISIK DAN PEMBERDAYAAN 70%											
				FISIK 30% (Rp)	BPD 20% (Rp)	PKK 10% (Rp)	PEMUKA AGAMA 10% (Rp)	LEMBAGA ADAT 10% (Rp)	PEMUDA 10% (Rp)	LPM 5% (Rp)	HANSIP 5% (Rp)				
1	BOLAANG UKI														
	1 MOLIBAGU	36,236,401	84,551,601	25,365,480	16,910,320	8,455,160	8,455,160	8,455,160	8,455,160	4,227,580	4,227,580	120,788,002	67,800,000	18,000,000	206,588,002
	2 POPODU	35,544,561	82,937,308	24,881,192	16,587,462	8,293,731	8,293,731	8,293,731	8,293,731	4,146,865	4,146,865	118,481,869	95,400,000	30,000,000	243,881,869
	3 SONDANA	31,555,657	73,629,867	22,088,960	14,725,973	7,362,987	7,362,987	7,362,987	7,362,987	3,681,493	3,681,493	105,185,524	75,600,000	24,000,000	204,785,524
	4 TOLONDADU	29,693,243	69,284,235	20,785,270	13,856,847	6,928,423	6,928,423	6,928,423	6,928,423	3,464,212	3,464,212	98,977,478	79,800,000	18,000,000	196,777,478
	5 TOLONDADU I	30,070,114	70,163,600	21,049,080	14,032,720	7,016,360	7,016,360	7,016,360	7,016,360	3,508,180	3,508,180	100,233,715	60,000,000	12,000,000	172,233,715
	6 TOLONDADU II	26,820,477	62,581,113	18,774,334	12,516,223	6,258,111	6,258,111	6,258,111	6,258,111	3,129,056	3,129,056	89,401,589	79,800,000	18,000,000	187,201,589
	7 TABILAA	27,523,375	64,221,208	19,266,362	12,844,242	6,422,121	6,422,121	6,422,121	6,422,121	3,211,060	3,211,060	91,744,583	87,600,000	24,000,000	203,344,583
	8 TOLUAYA	29,907,520	69,784,214	20,935,264	13,956,843	6,978,421	6,978,421	6,978,421	6,978,421	3,489,211	3,489,211	99,691,734	67,800,000	18,000,000	185,491,734
	9 SOGUO	27,729,039	64,701,092	19,410,328	12,940,218	6,470,109	6,470,109	6,470,109	6,470,109	3,235,055	3,235,055	92,430,131	67,800,000	18,000,000	178,230,131
	10 SALONGO	29,716,768	69,339,126	20,801,738	13,867,825	6,933,913	6,933,913	6,933,913	6,933,913	3,466,956	3,466,956	99,055,895	95,400,000	30,000,000	224,455,895
	11 PINOLANTUNGAN	29,580,762	69,021,779	20,706,534	13,804,356	6,902,178	6,902,178	6,902,178	6,902,178	3,451,089	3,451,089	98,602,541	67,800,000	18,000,000	184,402,541
	12 DUDEPO	29,855,252	69,662,255	20,898,677	13,932,451	6,966,226	6,966,226	6,966,226	6,966,226	3,483,113	3,483,113	99,517,508	79,800,000	18,000,000	197,317,508
	13 TANGAGAH	28,782,801	67,159,869	20,147,961	13,431,974	6,715,987	6,715,987	6,715,987	6,715,987	3,357,993	3,357,993	95,942,669	75,600,000	24,000,000	195,542,669
	14 BINIHA	29,652,458	69,189,070	20,756,721	13,837,814	6,918,907	6,918,907	6,918,907	6,918,907	3,459,453	3,459,453	98,841,528	75,600,000	24,000,000	198,441,528
	15 BINIHA TIMUR	26,669,030	62,227,736	18,668,321	12,445,547	6,222,774	6,222,774	6,222,774	6,222,774	3,111,387	3,111,387	88,896,766	60,000,000	12,000,000	160,896,766
	16 DUMINANGA	29,409,962	68,623,245	20,586,974	13,724,649	6,862,325	6,862,325	6,862,325	6,862,325	3,431,162	3,431,162	98,033,207	75,600,000	24,000,000	197,633,207
	17 BAKIDA	30,870,062	72,030,145	21,609,044	14,406,029	7,203,015	7,203,015	7,203,015	7,203,015	3,601,507	3,601,507	102,900,207	83,400,000	30,000,000	216,300,207
	18 SOPUTA	28,142,788	65,666,505	19,699,951	13,133,301	6,566,650	6,566,650	6,566,650	6,566,650	3,283,325	3,283,325	93,809,292	67,800,000	18,000,000	179,609,292
	19 SINANDAKA	30,175,423	70,409,321	21,122,796	14,081,864	7,040,932	7,040,932	7,040,932	7,040,932	3,520,466	3,520,466	100,584,744	75,600,000	24,000,000	200,184,744
	20 PANGIA	30,517,516	71,207,538	21,362,261	14,241,508	7,120,754	7,120,754	7,120,754	7,120,754	3,560,377	3,560,377	101,725,054	75,600,000	24,000,000	201,325,054
	21 SALONGO TIMUR	25,363,028	59,180,398	17,754,119	11,836,080	5,918,040	5,918,040	5,918,040	5,918,040	2,959,020	2,959,020	84,543,425	72,000,000	12,000,000	168,543,425
	22 PINTADIA	24,407,696	56,951,290	17,085,387	11,390,258	5,695,129	5,695,129	5,695,129	5,695,129	2,847,565	2,847,565	81,358,986	72,000,000	12,000,000	165,358,986
	23 TRANS PATO'A	26,176,597	61,078,726	18,323,618	12,215,745	6,107,873	6,107,873	6,107,873	6,107,873	3,053,936	3,053,936	87,255,323	79,800,000	18,000,000	185,055,323
	24 MOTOLOHU	29,026,535	67,728,581	20,318,574	13,545,716	6,772,858	6,772,858	6,772,858	6,772,858	3,386,429	3,386,429	96,755,116	67,800,000	18,000,000	182,555,116

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR // TAHUN 2014
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA,
 TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA DAN
 TUNJANGAN KETUA RUKUN TETANGGA

**DAFTAR REKAPITULASI KEUANGAN BAGI DESA TAHUN 2014
 UNTUK MASING-MASING DESA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	KECAMATAN/DESA	ADD										JUMLAH ADD	JUMLAH TPAPD	JUMLAH TUNJANGAN RT	JUMLAH TOTAL BANTUAN KEUANGAN DESA
		OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA 30% (Rp)	FISIK DAN PEMBERDAYAAN 70% (Rp)	RINCIAN PENGGUNAAN FISIK DAN PEMBERDAYAAN 70%											
				FISIK 30% (Rp)	BPD 20% (Rp)	PKK 10% (Rp)	PEMUKA AGAMA 10% (Rp)	LEMBAGA ADAT 10% (Rp)	PEMUDA 10% (Rp)	LPM 5% (Rp)	HANSIP 5% (Rp)				
1	BOLAANG UKI														
	1 MOLIBAGU	36,236,401	84,551,601	25,365,480	16,910,320	8,455,160	8,455,160	8,455,160	8,455,160	4,227,580	4,227,580	120,788,002	67,800,000	18,000,000	206,588,002
	2 POPODU	35,544,561	82,937,308	24,881,192	16,587,462	8,293,731	8,293,731	8,293,731	8,293,731	4,146,865	4,146,865	118,481,869	95,400,000	30,000,000	243,881,869
	3 SONDANA	31,555,657	73,629,867	22,088,960	14,725,973	7,362,987	7,362,987	7,362,987	7,362,987	3,681,493	3,681,493	105,185,524	75,600,000	24,000,000	204,785,524
	4 TOLONDADU	29,693,243	69,284,235	20,785,270	13,856,847	6,928,423	6,928,423	6,928,423	6,928,423	3,464,212	3,464,212	98,977,478	79,800,000	18,000,000	196,777,478
	5 TOLONDADU I	30,070,114	70,163,600	21,049,080	14,032,720	7,016,360	7,016,360	7,016,360	7,016,360	3,508,180	3,508,180	100,233,715	60,000,000	12,000,000	172,233,715
	6 TOLONDADU II	26,820,477	62,581,113	18,774,334	12,516,223	6,258,111	6,258,111	6,258,111	6,258,111	3,129,056	3,129,056	89,401,589	79,800,000	18,000,000	187,201,589
	7 TABILAA	27,523,375	64,221,208	19,266,362	12,844,242	6,422,121	6,422,121	6,422,121	6,422,121	3,211,060	3,211,060	91,744,583	87,600,000	24,000,000	203,344,583
	8 TOLUAYA	29,907,520	69,784,214	20,935,264	13,956,843	6,978,421	6,978,421	6,978,421	6,978,421	3,489,211	3,489,211	99,691,734	67,800,000	18,000,000	185,491,734
	9 SOGUO	27,729,039	64,701,092	19,410,328	12,940,218	6,470,109	6,470,109	6,470,109	6,470,109	3,235,055	3,235,055	92,430,131	67,800,000	18,000,000	178,230,131
	10 SALONGO	29,716,768	69,339,126	20,801,738	13,867,825	6,933,913	6,933,913	6,933,913	6,933,913	3,466,956	3,466,956	99,055,895	95,400,000	30,000,000	224,455,895
	11 PINOLANTUNGAN	29,580,762	69,021,779	20,706,534	13,804,356	6,902,178	6,902,178	6,902,178	6,902,178	3,451,089	3,451,089	98,602,541	67,800,000	18,000,000	184,402,541
	12 DUDEPO	29,855,252	69,662,255	20,898,677	13,932,451	6,966,226	6,966,226	6,966,226	6,966,226	3,483,113	3,483,113	99,517,508	79,800,000	18,000,000	197,317,508
	13 TANGAGAH	28,782,801	67,159,869	20,147,961	13,431,974	6,715,987	6,715,987	6,715,987	6,715,987	3,357,993	3,357,993	95,942,669	75,600,000	24,000,000	195,542,669
	14 BINIHA	29,652,458	69,189,070	20,756,721	13,837,814	6,918,907	6,918,907	6,918,907	6,918,907	3,459,453	3,459,453	98,841,528	75,600,000	24,000,000	198,441,528
	15 BINIHA TIMUR	26,669,030	62,227,736	18,668,321	12,445,547	6,222,774	6,222,774	6,222,774	6,222,774	3,111,387	3,111,387	88,896,766	60,000,000	12,000,000	160,896,766
	16 DUMINANGA	29,409,962	68,623,245	20,586,974	13,724,649	6,862,325	6,862,325	6,862,325	6,862,325	3,431,162	3,431,162	98,033,207	75,600,000	24,000,000	197,633,207
	17 BAKIDA	30,870,062	72,030,145	21,609,044	14,406,029	7,203,015	7,203,015	7,203,015	7,203,015	3,601,507	3,601,507	102,900,207	83,400,000	30,000,000	216,300,207
	18 SOPUTA	28,142,788	65,666,505	19,699,951	13,133,301	6,566,650	6,566,650	6,566,650	6,566,650	3,283,325	3,283,325	93,809,292	67,800,000	18,000,000	179,609,292
	19 SINANDAKA	30,175,423	70,409,321	21,122,796	14,081,864	7,040,932	7,040,932	7,040,932	7,040,932	3,520,466	3,520,466	100,584,744	75,600,000	24,000,000	200,184,744
	20 PANGIA	30,517,516	71,207,538	21,362,261	14,241,508	7,120,754	7,120,754	7,120,754	7,120,754	3,560,377	3,560,377	101,725,054	75,600,000	24,000,000	201,325,054
	21 SALONGO TIMUR	25,363,028	59,180,398	17,754,119	11,836,080	5,918,040	5,918,040	5,918,040	5,918,040	2,959,020	2,959,020	84,543,425	72,000,000	12,000,000	168,543,425
	22 PINTADIA	24,407,696	56,951,290	17,085,387	11,390,258	5,695,129	5,695,129	5,695,129	5,695,129	2,847,565	2,847,565	81,358,986	72,000,000	12,000,000	165,358,986
	23 TRANS PATO'A	26,176,597	61,078,726	18,323,618	12,215,745	6,107,873	6,107,873	6,107,873	6,107,873	3,053,936	3,053,936	87,255,323	79,800,000	18,000,000	185,055,323
	24 MOTOLOHU	29,026,535	67,728,581	20,318,574	13,545,716	6,772,858	6,772,858	6,772,858	6,772,858	3,386,429	3,386,429	96,755,116	67,800,000	18,000,000	182,555,116

	KECAMATAN/DESA	ADD										JUMLAH ADD	JUMLAH TPAPD	JUMLAH TUNJANGAN RT	JUMLAH TOTAL BANTUAN KEUANGAN DESA
		OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA 30% (Rp)	FISIK DAN PEMBERDAYAAN 70% (Rp)	RINCIAN PENGGUNAAN FISIK DAN PEMBERDAYAAN 70%											
				FISIK 30% (Rp)	BPD 20% (Rp)	PKK 10% (Rp)	PEMUKA AGAMA 10% (Rp)	LEMBAGA ADAT 10% (Rp)	PEMUDA 10% (Rp)	LPM 5% (Rp)	HANSIP 5% (Rp)				
2	POSIGADAN														
	1 BOTULIUDU	29,503,355	68,841,161	20,652,348	13,768,232	6,884,116	6,884,116	6,884,116	6,884,116	3,442,058	3,442,058	98,344,515	67,800,000	18,000,000	184,144,515
	2 TOLUTU	31,281,635	72,990,482	21,897,145	14,598,096	7,299,048	7,299,048	7,299,048	7,299,048	3,649,524	3,649,524	104,272,118	75,600,000	24,000,000	203,872,118
	3 MILANGODAA	32,473,792	75,772,182	22,731,655	15,154,436	7,577,218	7,577,218	7,577,218	7,577,218	3,788,609	3,788,609	108,245,975	75,600,000	21,000,000	204,845,975
	4 MILANGODAA BARAT	30,239,623	70,559,119	21,167,736	14,111,824	7,055,912	7,055,912	7,055,912	7,055,912	3,527,956	3,527,956	100,798,742	75,600,000	24,000,000	200,398,742
	5 SINOMBAYUGA	32,440,987	75,695,637	22,708,691	15,139,127	7,569,564	7,569,564	7,569,564	7,569,564	3,784,782	3,784,782	108,136,624	79,800,000	18,000,000	205,936,624
	6 SAKTI	32,732,867	76,376,690	22,913,007	15,275,338	7,637,669	7,637,669	7,637,669	7,637,669	3,818,834	3,818,834	109,109,557	75,600,000	24,000,000	208,709,557
	7 LUWOO	32,966,058	76,920,802	23,076,241	15,384,160	7,692,080	7,692,080	7,692,080	7,692,080	3,846,040	3,846,040	109,886,860	75,600,000	24,000,000	209,486,860
	8 PILOLAHUNGA	29,420,272	68,647,301	20,594,190	13,729,460	6,864,730	6,864,730	6,864,730	6,864,730	3,432,365	3,432,365	98,067,573	87,600,000	24,000,000	209,667,573
	9 MOMALIA I	31,566,838	73,655,954	22,096,786	14,731,191	7,365,595	7,365,595	7,365,595	7,365,595	3,682,798	3,682,798	105,222,792	95,400,000	30,000,000	230,622,792
	10 MOMALIA II	31,258,371	72,936,198	21,880,859	14,587,240	7,293,620	7,293,620	7,293,620	7,293,620	3,646,810	3,646,810	104,194,569	83,400,000	30,000,000	217,594,569
	11 MEYAMBANGA	31,640,589	73,828,042	22,148,413	14,765,608	7,382,804	7,382,804	7,382,804	7,382,804	3,691,402	3,691,402	105,468,631	87,600,000	24,000,000	217,068,631
	12 TONALA	30,522,274	71,218,640	21,365,592	14,243,728	7,121,864	7,121,864	7,121,864	7,121,864	3,560,932	3,560,932	101,740,915	79,800,000	18,000,000	199,540,915
	13 MANGGADA	27,963,489	65,248,140	19,574,442	13,049,628	6,524,814	6,524,814	6,524,814	6,524,814	3,262,407	3,262,407	93,211,629	79,800,000	18,000,000	191,011,629
	14 SAIBUAH	33,300,541	77,701,262	23,310,379	15,540,252	7,770,126	7,770,126	7,770,126	7,770,126	3,885,063	3,885,063	111,001,802	83,400,000	30,000,000	224,401,802
	15 LION	28,362,998	66,180,328	19,854,098	13,236,066	6,618,033	6,618,033	6,618,033	6,618,033	3,309,016	3,309,016	94,543,325	79,800,000	18,000,000	192,343,325
	16 PAKUKU JAYA	29,844,513	69,637,197	20,891,159	13,927,439	6,963,720	6,963,720	6,963,720	6,963,720	3,481,860	3,481,860	99,481,709	60,000,000	12,000,000	171,481,709
	17 NUNUKA RAYA	30,200,886	70,468,733	21,140,620	14,093,747	7,046,873	7,046,873	7,046,873	7,046,873	3,523,437	3,523,437	100,669,618	79,800,000	18,000,000	198,469,618
	18 MOLOSIPAT	29,957,659	69,901,204	20,970,361	13,980,241	6,990,120	6,990,120	6,990,120	6,990,120	3,495,060	3,495,060	99,858,863	79,800,000	18,000,000	197,658,863
	19 MEYAMBANGA TIMUR	29,735,024	69,381,723	20,814,517	13,876,345	6,938,172	6,938,172	6,938,172	6,938,172	3,469,086	3,469,086	99,116,747	79,800,000	18,000,000	196,916,747
	20 ILOHELUMA	31,063,752	72,482,088	21,744,626	14,496,418	7,248,209	7,248,209	7,248,209	7,248,209	3,624,104	3,624,104	103,545,840	79,800,000	18,000,000	201,345,840
	21 MILANGODAA UTARA	28,286,460	66,001,741	19,800,522	13,200,348	6,600,174	6,600,174	6,600,174	6,600,174	3,300,087	3,300,087	94,288,201	79,800,000	18,000,000	192,088,201
3	PINOLOSIAN														
	1 LINAWAN 1	30,463,012	71,080,360	21,324,108	14,216,072	7,108,036	7,108,036	7,108,036	7,108,036	3,554,018	3,554,018	101,543,372	75,600,000	24,000,000	201,143,372
	2 LINAWAN	30,596,354	71,391,492	21,417,448	14,278,298	7,139,149	7,139,149	7,139,149	7,139,149	3,569,575	3,569,575	101,987,846	67,800,000	18,000,000	187,787,846
	3 NUNUK	34,066,744	79,489,069	23,846,721	15,897,814	7,948,907	7,948,907	7,948,907	7,948,907	3,974,453	3,974,453	113,555,812	75,600,000	24,000,000	213,155,812
	4 ILOMATA	28,780,725	67,155,025	20,146,508	13,431,005	6,715,503	6,715,503	6,715,503	6,715,503	3,357,751	3,357,751	95,935,751	67,800,000	18,000,000	181,735,751
	5 PINOLOSIAN	29,756,455	69,431,728	20,829,518	13,886,346	6,943,173	6,943,173	6,943,173	6,943,173	3,471,586	3,471,586	99,188,182	87,600,000	24,000,000	210,788,182
	6 PINOLOSIAN SELATAN	29,712,618	69,329,442	20,798,832	13,865,888	6,932,944	6,932,944	6,932,944	6,932,944	3,466,472	3,466,472	99,042,059	60,000,000	12,000,000	171,042,059
	7 TOLOTOYON	31,492,467	73,482,424	22,044,727	14,696,485	7,348,242	7,348,242	7,348,242	7,348,242	3,674,121	3,674,121	104,974,891	83,400,000	30,000,000	218,374,891
	8 KOMBOT	30,680,345	71,587,473	21,476,242	14,317,495	7,158,747	7,158,747	7,158,747	7,158,747	3,579,374	3,579,374	102,267,818	103,200,000	36,000,000	241,467,818
	9 LUNGKAP	30,996,002	72,324,005	21,697,201	14,464,801	7,232,400	7,232,400	7,232,400	7,232,400	3,616,200	3,616,200	103,320,007	79,800,000	18,000,000	201,120,007
4	PINOLOSIAN TENGAH														
	1 MATAINDO	29,558,776	68,970,478	20,691,143	13,794,096	6,897,048	6,897,048	6,897,048	6,897,048	3,448,524	3,448,524	98,529,255	60,000,000	12,000,000	170,529,255
	2 TOROSIK	31,141,900	72,664,433	21,799,330	14,532,887	7,266,443	7,266,443	7,266,443	7,266,443	3,633,222	3,633,222	103,806,333	67,800,000	18,000,000	189,606,333
	3 ADOW SELATAN	29,101,639	67,903,825	20,371,147	13,580,765	6,790,382	6,790,382	6,790,382	6,790,382	3,395,191	3,395,191	97,005,464	75,600,000	24,000,000	196,605,464
	4 ADOW	31,567,069	73,656,495	22,096,948	14,731,299	7,365,649	7,365,649	7,365,649	7,365,649	3,682,825	3,682,825	105,223,564	87,600,000	24,000,000	216,823,564
	5 DEAGA	26,587,964	62,038,582	18,611,575	12,407,716	6,203,858	6,203,858	6,203,858	6,203,858	3,101,929	3,101,929	88,626,546	60,000,000	12,000,000	160,626,546

KECAMATAN/DESA		ADD										JUMLAH ADD	JUMLAH TPAPD	JUMLAH TUNJANGAN RT	JUMLAH TOTAL BANTUAN KEUANGAN DESA
		OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA 30% (Rp)	FISIK DAN PEMBERDAYAAN 70% (Rp)	RINCIAN PENGGUNAAN FISIK DAN PEMBERDAYAAN 70%											
				FISIK 30% (Rp)	BPD 20% (Rp)	PKK 10% (Rp)	PEMUKA AGAMA 10% (Rp)	LEMBAGA ADAT 10% (Rp)	PEMUDA 10% (Rp)	LPM 5% (Rp)	HANSIP 5% (Rp)				
6	TOBAYAGAN	30,835,680	71,949,920	21,584,976	14,389,984	7,194,992	7,194,992	7,194,992	7,194,992	3,597,496	3,597,496	102,785,601	75,600,000	24,000,000	202,385,601
PINOLOSIAN TIMUR															
1	MOTANDOI	31,271,834	72,967,612	21,890,284	14,593,522	7,296,761	7,296,761	7,296,761	7,296,761	3,648,381	3,648,381	104,239,446	72,000,000	15,000,000	191,239,446
2	DUMAGIN B	32,057,728	74,801,365	22,440,409	14,960,273	7,480,136	7,480,136	7,480,136	7,480,136	3,740,068	3,740,068	106,859,092	67,800,000	18,000,000	192,659,092
3	DUMAGIN A	31,792,224	74,181,857	22,254,557	14,836,371	7,418,186	7,418,186	7,418,186	7,418,186	3,709,093	3,709,093	105,974,081	87,600,000	24,000,000	217,574,081
4	ONGGUNOI	32,248,641	75,246,828	22,574,048	15,049,366	7,524,683	7,524,683	7,524,683	7,524,683	3,762,341	3,762,341	107,495,469	87,600,000	24,000,000	219,095,469
5	DAYOW	31,039,473	72,425,437	21,727,631	14,485,087	7,242,544	7,242,544	7,242,544	7,242,544	3,621,272	3,621,272	103,464,910	79,800,000	18,000,000	201,264,910
6	PIDUNG	31,092,873	72,550,038	21,765,011	14,510,008	7,255,004	7,255,004	7,255,004	7,255,004	3,627,502	3,627,502	103,642,911	79,800,000	18,000,000	201,442,911
7	MODISI	31,275,515	72,976,203	21,892,861	14,595,241	7,297,620	7,297,620	7,297,620	7,297,620	3,648,810	3,648,810	104,251,718	60,000,000	12,000,000	176,251,718
8	POSILAGON	32,274,471	75,307,099	22,592,130	15,061,420	7,530,710	7,530,710	7,530,710	7,530,710	3,765,355	3,765,355	107,581,570	67,800,000	18,000,000	193,381,570
9	ILIGON	30,400,443	70,934,368	21,280,310	14,186,874	7,093,437	7,093,437	7,093,437	7,093,437	3,546,718	3,546,718	101,334,811	83,400,000	12,000,000	196,734,811
JUMLAH TOTAL												6,956,600,000	5,280,000,000	1,410,000,000	13,646,600,000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU

KECAMATAN/DESA		ADD										JUMLAH ADD	JUMLAH TPAPD	JUMLAH TUNJANGAN RT	JUMLAH TOTAL BANTUAN KEUANGAN DESA
		OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA 30% (Rp)	FISIK DAN PEMBERDAYAAN 70% (Rp)	RINCIAN PENGGUNAAN FISIK DAN PEMBERDAYAAN 70%											
				FISIK 30% (Rp)	BPD 20% (Rp)	PKK 10% (Rp)	PEMUKA AGAMA 10% (Rp)	LEMBAGA ADAT 10% (Rp)	PEMUDA 10% (Rp)	LPM 5% (Rp)	HANSIP 5% (Rp)				
6	TOBAYAGAN	30,835,680	71,949,920	21,584,976	14,389,984	7,194,992	7,194,992	7,194,992	7,194,992	3,597,496	3,597,496	102,785,601	75,600,000	24,000,000	202,385,601
PINOLOSIAN TIMUR															
1	MOTANDOI	31,271,834	72,967,612	21,890,284	14,593,522	7,296,761	7,296,761	7,296,761	7,296,761	3,648,381	3,648,381	104,239,446	72,000,000	15,000,000	191,239,446
2	DUMAGIN B	32,057,728	74,801,365	22,440,409	14,960,273	7,480,136	7,480,136	7,480,136	7,480,136	3,740,068	3,740,068	106,859,092	67,800,000	18,000,000	192,659,092
3	DUMAGIN A	31,792,224	74,181,857	22,254,557	14,836,371	7,418,186	7,418,186	7,418,186	7,418,186	3,709,093	3,709,093	105,974,081	87,600,000	24,000,000	217,574,081
4	ONGGUNOI	32,248,641	75,246,828	22,574,048	15,049,366	7,524,683	7,524,683	7,524,683	7,524,683	3,762,341	3,762,341	107,495,469	87,600,000	24,000,000	219,095,469
5	DAYOW	31,039,473	72,425,437	21,727,631	14,485,087	7,242,544	7,242,544	7,242,544	7,242,544	3,621,272	3,621,272	103,464,910	79,800,000	18,000,000	201,264,910
6	PIDUNG	31,092,873	72,550,038	21,765,011	14,510,008	7,255,004	7,255,004	7,255,004	7,255,004	3,627,502	3,627,502	103,642,911	79,800,000	18,000,000	201,442,911
7	MODISI	31,275,515	72,976,203	21,892,861	14,595,241	7,297,620	7,297,620	7,297,620	7,297,620	3,648,810	3,648,810	104,251,718	60,000,000	12,000,000	176,251,718
8	POSILAGON	32,274,471	75,307,099	22,592,130	15,061,420	7,530,710	7,530,710	7,530,710	7,530,710	3,765,355	3,765,355	107,581,570	67,800,000	18,000,000	193,381,570
9	ILIGON	30,400,443	70,934,368	21,280,310	14,186,874	7,093,437	7,093,437	7,093,437	7,093,437	3,546,718	3,546,718	101,334,811	83,400,000	12,000,000	196,734,811
JUMLAH TOTAL												6,956,600,000	5,280,000,000	1,410,000,000	13,646,600,000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR // TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA,
TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA DAN
TUNJANGAN KETUA RUKUN TETANGGA

**DAFTAR REKAPITULASI KEUANGAN BAGI DESA TAHUN 2014
UNTUK MASING-MASING DESA PERSIAPAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

D	KECAMATAN/DESA	ADD										JUMLAH ADD	JUMLAH TPAPD	JUMLAH TUNJANGAN RT	JUMLAH TOTAL BANTUAN/KEUANGAN DESA
		OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	FISIK DAN PEMBERDAYAAN	RINCIAN PENGGUNAAN FISIK DAN PEMBERDAYAAN 70%											
				FISIK	BPD	PKK	PEMUKA AGAMA	LEMBAGA ADAT	PEMUDA	LPM	HANSIP				
		30% (Rp)	70% (Rp)	30% (Rp)	20% (Rp)	10% (Rp)	10% (Rp)	10% (Rp)	5% (Rp)	5% (Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	BOLAANG UKI														
	1 SALONGO BARAT	16,500,000	38,500,000	11,550,000	7,700,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	1,925,000	1,925,000	55,000,000	87,600,000	24,000,000	166,600,000
	2 HALABOLU	16,500,000	38,500,000	11,550,000	7,700,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	1,925,000	1,925,000	55,000,000	72,000,000	12,000,000	139,000,000
	3 BINIHA SELATAN	16,500,000	38,500,000	11,550,000	7,700,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	1,925,000	1,925,000	55,000,000	72,000,000	12,000,000	139,000,000
	4 DUDEPO BARAT	16,500,000	38,500,000	11,550,000	7,700,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	1,925,000	1,925,000	55,000,000	67,800,000	18,000,000	140,800,000
	POSIGADAN														
	1 MOMALIA III	16,500,000	38,500,000	11,550,000	7,700,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	1,925,000	1,925,000	55,000,000	79,800,000	18,000,000	152,800,000
	2 INOSOTA	16,500,000	38,500,000	11,550,000	7,700,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	1,925,000	1,925,000	55,000,000	72,000,000	12,000,000	139,000,000
	PINOLOSIAN														
	1 KOMBOT TIMUR	16,500,000	38,500,000	11,550,000	7,700,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	1,925,000	1,925,000	55,000,000	72,000,000	12,000,000	139,000,000
	PINOLOSIAN TENGAH														
	1 MATAINDO UTARA	16,500,000	38,500,000	11,550,000	7,700,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	1,925,000	1,925,000	55,000,000	72,000,000	12,000,000	139,000,000
	2 TOBAYAGAN SELATAN	16,500,000	38,500,000	11,550,000	7,700,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	1,925,000	1,925,000	55,000,000	72,000,000	12,000,000	139,000,000
	PINOLOSIAN TIMUR														
	1 MOTANDOI SELATAN	16,500,000	38,500,000	11,550,000	7,700,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	1,925,000	1,925,000	55,000,000	72,000,000	12,000,000	139,000,000
	2 PERJUANGAN	16,500,000	38,500,000	11,550,000	7,700,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	1,925,000	1,925,000	55,000,000	72,000,000	12,000,000	139,000,000
	3 ONGGUNOI SELATAN	16,500,000	38,500,000	11,550,000	7,700,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	1,925,000	1,925,000	55,000,000	72,000,000	18,000,000	145,000,000
	JUMLAH TOTAL											660,000,000	883,200,000	174,000,000	1,717,200,000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU